

**PENGAWASAN KEUANGAN MELALUI INSPEKTORAT UNTUK
MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

TESIS

*Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Disusun Oleh :

LUKY KURNIAWAN, S.H

NIM : 2120112008

Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.

Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**PENGAWASAN KEUANGAN MELALUI INSPEKTORAT UNTUK
MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

*Luky Kurniawan, 2120112008, Magister Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum
Universitas Andalas*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi kondisi masih banyaknya ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditemukan pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Seharusnya dengan adanya Inspektorat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan, penyimpangan atau ketidaksesuaian pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat dicegah atau diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab permasalahan pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan bagaimana tindak lanjut dari hasil pemeriksaan inspektorat daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui rekomendasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang dilakukan langsung di lapangan yang bertitik tolak pada data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan kuesioner kepada pihak yang kompeten dan relevan. Tujuannya adalah guna memperoleh pemahaman dan kejelasan dari permasalahan dari permasalahan yang diteliti berdasarkan praktik yang selama ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta tindak lanjut hasil pemeriksaan pasca rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut antara lain disebabkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi masih menghadapi kendala-kendala seperti kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, rendahnya komitmen dalam penyelesaian tindak lanjut, penggunaan sistem informasi hasil pemeriksaan yang belum optimal dan belum adanya sanksi terkait tindak lanjut.

Kata Kunci: Inspektorat Daerah Kabupaten, fungsi pengawasan, akuntabilitas
Pengelolaan keuangan daerah.

UNTUK

KEDJAJAAN

BANGSA

**FINANCIAL SUPERVISION THROUGH THE INSPECTORATE TO
REALIZE ACCOUNTABILITY OF REGIONAL FINANCIAL
MANAGEMENT IN KUANTAN SINGINGI REGENCY**

Luky Kurniawan, 2120112008, Master Of Law, University Of Andalas

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that there are still many discrepancies or deviations in regional financial management found in the Kuantan Singingi Regency Government based on the results of the BPK audit. Supposedly with the Regency Regional Inspectorate carrying out the supervisory function, irregularities or discrepancies in regional financial management can be prevented or minimized. This study aims to find out and answer the problems of the implementation of the supervisory function of the Regional Inspectorate of the Kuantan Singingi Regency regarding the accountability of regional financial management and how to follow up on the results of the regional inspectorate's examination of regional financial management through recommendations by the Supreme Audit Agency. The method used in this study is an empirical juridical method that is carried out directly in the field with a starting point on primary data obtained directly through interviews and questionnaires to competent and relevant parties. The aim is to gain understanding and clarity of the problems from the problems studied based on the practice that has been taking place so far. The results of the study show that to find out and analyze the implementation of the supervisory function of the Regional Inspectorate of the Kuantan Singingi Regency on the accountability of regional financial management and follow-up on the results of post-recommendation audits from the Supreme Audit Agency. This is partly due to the implementation of the supervisory function, the Regional Inspectorate of Kuantan Singingi Regency still faces obstacles such as inadequate quantity and quality of human resources, low commitment in completing follow-up, use of information systems on inspection results that are not yet optimal and there are no sanctions regarding follow-up.

Keywords: District Inspectorate, supervisory function, regional financial management accountability.